

## DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo, 2014, *Pengelolaan Pendapatan & Anggaran Daerah*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Adiwirya, Muhammad Firdiansayah dan I Putu Sudana, 2015, *Akuntabilitas, Transparansi dan Anggaran Berbasis Kinerja pada atuan Kerja Perangkat Daerah Kota Denpasar*, E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol 11.2 (2015), hal 611-628.
- Asrida 2012, *Pengaruh Penerapan Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi Keuangan terhadap Kinerja Penyusunan Anggaran pada Pemerintah Kabupaten Bireuen*, Jurnal Kebangsaan, Vol. 1, No.1, Januari 2012.
- Asmoko, Hindri, 2015, *Korelasi Opini Audit BPK atas LKKL dengan Hasil Evaluasi Lakip K/L*, Balai Diklat Kepemimpinan, BPPK Kementerian Keuangan, Jakarta.
- Auditya. L, Husaini, & Lismawati, 2013. *Analisis Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah*. Jurnal Fairness. Volume 3, Nomor 1: 21- 41
- Bastian, I, 2001, *Akuntansi Sektor Publik*, Edisi Pertama, Badan Penerbit Fakultas Ekonomi UGM, Yogyakarta.
- , I. 2006. *Akuntansi Sektor Publik, Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.

- Bruijn, Hans De. 2002. *Performance Measurement in The Public Sector: Strategies to Cope With The Risk of Performance Measurement*. Emerald Insight.
- Chow, C.W., Ganulin, D., Haddad, K. and Williamson, J. 1998. The balanced scorecard: a potent tool for energizing and focusing health-care organization management. *Journal of Health-care Management*
- Gray. R., D. L. Owen, dan C. Adams. 1996. *Accounting and Accountability: Changes and Challenges in Corporate Social and Environmental Reporting*. Prentice-Hall, Inc. London.
- Greiling, Dorothea. 2005. Performance measurement in the public sector: the German experience. *Emerald Research*, Vol. 54: 551-567.
- Halachmi, Arie. 2005. Performance measurement is only one way of managing performance. *International Journal of Productivity and Performance Management*. Vol. 54: 502-516.
- Halim, Abdul dan Muhammad Syam Kusufi. 2013. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah Jakarta: Salemba Empat*.
- Hamzah, Ardi 2007, *Pengaruh Belanja dan Pendapatan terhadap pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan dan Pengangguran*, Konferensi Penelitian, Jatim
- Hartanti, Karin. 2011. *Pandangan Publik Terhadap Akuntanilitas Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Tengah*. Semarang: Skripsi Fakultas Ekonmi Universitas Diponegoro.

Hasbi, Mohammad A. S, Analisis Perkembangan Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Pemerintah Kabupaten Bantul. Yogyakarta:Skripsi Faakultas Ekonomi Universitas Negri Yogyakarta.

Hendrikus Triwibawanto Dedeona “Akuntabilitas Kelembagaan Eksekutif”, Jurnal Ilmu Adminsitasi, STIA LAN , Bandung, Vol.4 No 1 Maret 2007

Herminingsih. 2009. “Pengaruh Partisipasi Anggaran dalam Penganggaran dan Peran Manajerial Pengelola Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Tesis Tidak Dipublikasikan, Program Pasca Sarjana Magister Akuntansi, Universitas Diponegoro Semarang.

Kemenpan-RB, 2016, Mewujudkan Birokrasi Bersih dan Melayani, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Jakarta.

Kerangka konseptual Standar Akuntansi Pemerintahan, 2005.

Kholmi, M. 2008. Persepsi Mahasiswa Akuntansi terhadap Akuntabilitas dan Transparansi Keuangan Partai Politik. Ekonomika-Bisnis, Jurnal Penelitian dan Pemikiran, Juni 01 (02): 215-226

Kumorotomo,Wahyudi,2005.Akuntabilitas Birokrasi Publik, Sketa Pada Masa Transisi. Jogjakarta : Pustaka Pelajar.

Lismawati, Husaini dan Lucy Aditya. 2013. Analisis Pengaruh Akunttabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah, Jurnal Fairness Volume 3, Nomor 1, 2013:21-41

Loina Lalolo Krina P. (2003). Indikator & Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi & Partisipasi. Jakarta: Sekretariat Good Public Governance Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Mahmudi. 2005. Manajemen Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: UPP AMP YKPN

-----, 2010, Manajemen Keuangan Daerah, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2010, Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Panduan bagi Eksekutif, DPRD, dan Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan Ekonomi, Sosial dan Politik, UPP STIM YKPN, Yogyakarta.

Magno, Ruiivo Barros, Abdul Hakim, Tjahjanulin Domai, 2015, Pengaruh Pengelolaan Anggaran Terhadap Kinerja Organisasi Pemerintah. (Studi pada Kabupaten Ainaro), Jurnal Reformasi, Vol. 5, No. 2, (2015)

Mangkuprawira, Tb. Syafri. 2004. Manajemen Sumber Daya Manusia Strategik. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik, Edisi Dua. Yogyakarta: Penerbit Andi . 2004. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta. Andi

-----, 2001. "Pengawasan, Pengendalian, Dan Pemeriksaan Kinerja Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah". Jurnal Bisnis dan Akuntansi. Vol 3, No.2 :441-456

-----, Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah, Penerbit ANDI, Yogyakarta, 2004

------. 2006. “Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance”. Jurnal Akuntansi Pemerintahan. Vol 2, No.1 :1-17

------. 2009. Akuntansi Sektor Publik. Andi. Yogyakarta

Meidawati, Nurida. 2012. Analisis Pengaruh Persepsi Penerapan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Jember. Jember

Menteri Dalam Negeri. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggung-jawaban, dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah, dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Menteri Dalam Negeri. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Menteri Dalam Negeri. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Meuthia Ganie Rahman, “Good Governance, Prinsip, Komponen, dan Penerapannya” dalam Hak Asasi Manusia (Penyelenggaraan Negara Yang Baik ), Penerbit Komnas HAM, Jakarta, 2000

Muhammad Firdiansyah Adiwirya. (2015). Akuntabilitas, Transparansi, dan Anggaran Berbasis Kinerja Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Denpasar. Jurnal Akuntansi Universitas Udayana. Vol 11.2.

- Mulyadi. 2001. Analisis Pengaruh FaktorFaktor Good Governance Terhadap Kualitas Pelayanan Bagi Wajib Pajak.Jakarta: BINUS University.
- Nico Andrianto. (2007). Good e-Government: Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui e-Government. Malang: Bayumedia Publishing.
- Noor Cholis Madjid dan Hasan Ashari. (2013). Analisis Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja (studi Kasus Pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan). Jakarta: Kementrian Keuangan Republik Indonesia Badan pendidikan dan Pelatihan keuangan.
- Nurlaila. 2010. Manajemen Sumberdaya Manusia 1. Jakarta: Penerbit LepKhair
- Rezky Mulya Anugriani. (2014). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Pengawasan Terhadap Kinerja Anggaran Berkonsep Value for Money Pada Instansi Pemerintah di Kabupaten Bone. Skripsi. Makasar: Universitas Hasanudin Makasar.
- Rohman, A. 2009. Akuntansi Sektor Publik Telaah dari Dimensi : Pengelolaan Keuangan Daerah, Good Governance, Pengendalian, Pengawasan dan Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Rohmah, Lailatur. 2012. Persepsi Mahasiswa Akuntansi Unesa Tentang Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Partai Politik Terhadap Kinerja Partai dan Upaya Pemberantasan Kejahatan KeraH Putih. Surabaya:Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Negri Surabaya.

Siregar, Liper, 2011, Pengaruh Akuntabilitas Publik, Transparansi Publik dan Pengawasan terhadap Pengelolaan APBD dengan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai Variabel Moderator pada Pemerintah Kota Pematangsiantar, Tesis, Universitas Sumatera Utara, Medan.

Sopannah dan Wahyudi, Isa. 2010. Pengaruh Akuntabilitas Publik, Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik terhadap Hubungan antara Pengetahuan Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah. <http://ejournal.umm.ac.id>. Diunduh pada tanggal 29 Juli 2014.

Sugeng, 2014, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengelolaan Keuangan Daerah dan Implikasinya Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri, Jurnal Riset Ekonomi dan Bisnis, Vol. 1, No.2, Juli 2014. Suparno, 2012. Pengaruh Akuntabilitas Keuangan Daerah, Value For Money, Kejujuran, Transparansi, dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Kajian Pada Pemerintah Kota Dumai). Tesis. Medan. Program Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara.

Suriani, Seri, 2015, The Effect of Performance-Based Budgeting Implementation towards the Institution Performance Accountability (Case Study: Wajo), Jurnal Information Management and Business Review Vol. 7, No. 4, pp. 6-22, August 2015.

Tuasikal, A. 2006. "Pengaruh Pengawasan, Pemahaman Sistem Akuntansi dan Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Unit Satuan Kerja Pemerintah Daerah (Studi pada Provinsi dan Kabupaten/Kota di

Maluku).” Disertasi Tidak Dipublikasikan, Universitas Padjajaran bandung.

-----, A. 2007. “Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi, Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah (Studi pada Kabupaten Maluku Tengah di Provinsi Maluku).” *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Sektor Publik*, Vol. 08, No. 01, pp.1466-148

Peraturan Daerah Nomor 58 tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. (2005). Jakarta: Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. (2005). Jakarta: Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 90 tahun 2010 Tentang Penerapan penganggaran berbasis Kinerja. (2010). Jakarta: Republik Indonesia.

Prayitno, Duwi. 2010. *Paham Analisa Data Statistik Dengan SPSS*. Yogyakarta:MediaKom.

Wood, L. 1998. *Local Government Dollars & Sense* (Rancho Palos Verdes, CA.: Training Shoppe).

Zeyn. E. 2011. Pengaruh Penerapan Good Governance dan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Akuntabilitas Keuangan. *Trikonomika*, Vol 10, No. 1, Juni 2011: Hal 52-62